



RINGKASAN

AMALIA NIFA NATASYA. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama (*Application of Income Tax Article 4 (2) and Income Tax Article 23 at PT. Resto Pangan Utama*). Di bimbing oleh ABDUL KOHAR.

PT. Resto Pangan Utama melakukan kerja sama dengan vendor atau perusahaan lainnya dalam menjalankan usahanya. PT. Resto Pangan Utama seringkali menggunakan jasa vendor seperti jasa ekspedisi, jasa *outsourcing*, jasa perawatan dan pemeliharaan serta beberapa jasa lainnya yang termasuk objek pajak PPh Pasal 23. PT. Resto Pangan Utama juga melakukan penyewaan gedung dan bangunan sebagai salah satu kantornya untuk itu PT. Resto Pangan Utama melakukan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23, mengetahui bagaimana cara penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23, mengetahui bagaimana cara pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23, mengetahui bagaimana cara pencatatan akuntansi PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23, dan mengetahui evaluasi pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 di PT. Resto Pangan Utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini antara lain wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Proses pengumpulan data ini dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimulai pada 02 Februari 2021 sampai 02 April 2021 di PT Resto Pangan Utama.

PT. Resto Pangan Utama dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan setiap transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 yang sudah sesuai dengan tarif. Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 sudah dilakukan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah yaitu sistem e-Billing. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 sudah menggunakan sistem elektronik yaitu sistem e-Filling yang dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PT. Resto Pangan Utama selalu mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan transaksi pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23. Evaluasi pelaksanaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 23, Sistem Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.